

dengan para PPAT di Kota Semarang, maka Kantor Pertanahan Kota Sema-
rang juga harus meningkatkan pengawasan terhadap para PPAT di wilayah-
nya agar terwujud PPAT yang profesional serta sadar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku - Buku

- Erlies, Septiana N. dan Salim HS. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1*. Jakarta: Djambatan.
- Iga Gangga, S. D. 2012. *Buku Ajar Teori dan Praktik Hak Tanggungan*. Semarang: UPT Undip Press.
- Kashadi dan Purwahid Patrik. 2009. *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khoidin. 2005. *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Komaruddin, Y. T. 2002. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Marzuki, P. M. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramelan, Eman. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah : Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sibarani, Bachtiar. 2011. *Asas - Asas Pendaftaran Hak Atas Tanah*. Surabaya: Ilmu Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Soemitro, R. H. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Jurnal atau Karya Ilmiah

- Famaldiana, L. M. 2016. *Implikasi Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Peralihan Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima)*, Jurnal IUS (Magister Kenotariatan Universitas Mataram, Mataram).
- Harinata, Surya. 2014. *Akibat Hukum Lewatnya Batas Waktu Kewajiban Mendaftarkan APHT Oleh PPAT*, Jurnal Ilmiah (Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, Surabaya).
- Sudarjanto, W. J. 1996. *Pokok - Pokok Kebijakan dalam UUHT*, Makalah pada Seminar Nasional "UUHT".

3. Peraturan Perundang - undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda -Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BeaPerolehan Hak AtasTanah Dan Bangunan.
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997tentang BeaPerolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan
Pejabat yang Dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan
Kewajibannya.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 640 - 1198 mengenai Penyampaian Peraturan Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tanggal 1 April 1999.

LAMPIRAN